



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

TAHUN
2024

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

*Bagian Aggaran 005.03
Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI*



www.pn-pontianak.go.id



0812 5775 8489
(INDI Whatsapp Bot)

BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Sultan Abdurrahman No. 89

Telp. 0561-734100 Fax. 0561-763196

Pontianak - Kalimantan Barat

e-mail : pengadilannegeriptk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan didalam laporan keuangan (laporan posisi keuangan) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi

kebutuhan manajemen pemerintah dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang disusun untuk Periode Tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.



I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah/sumbangan/sejenisnya, pelaksanaan dari perjanjian kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (sitaan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan;
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan; dan
11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntasi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

Penatausahaan BMN yang semula menggunakan Aplikasi SIMAK BMN saat ini sudah menggunakan Aplikasi SAKTI dimana Modul Persediaan dan Aset Tetap terintegrasi dalam satu aplikasi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Pena
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK/.06/2019 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendeklegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam pengerajan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerajan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjengjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ditingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi SAKTI.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian, melalui aplikasi Mon SAKTI.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Pontianak adalah sebesar Rp135.928.046,- dengan rincian sebagai berikut:

KODE AKUN	URAIAN	NILAI RUPIAH
117111	Barang Konsumsi	135.928.046
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0

131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0
134112	Irigasi	0
134113	Jaringan	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
Total		135.928.046

Berikut tabel dan grafik nilai BMN Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

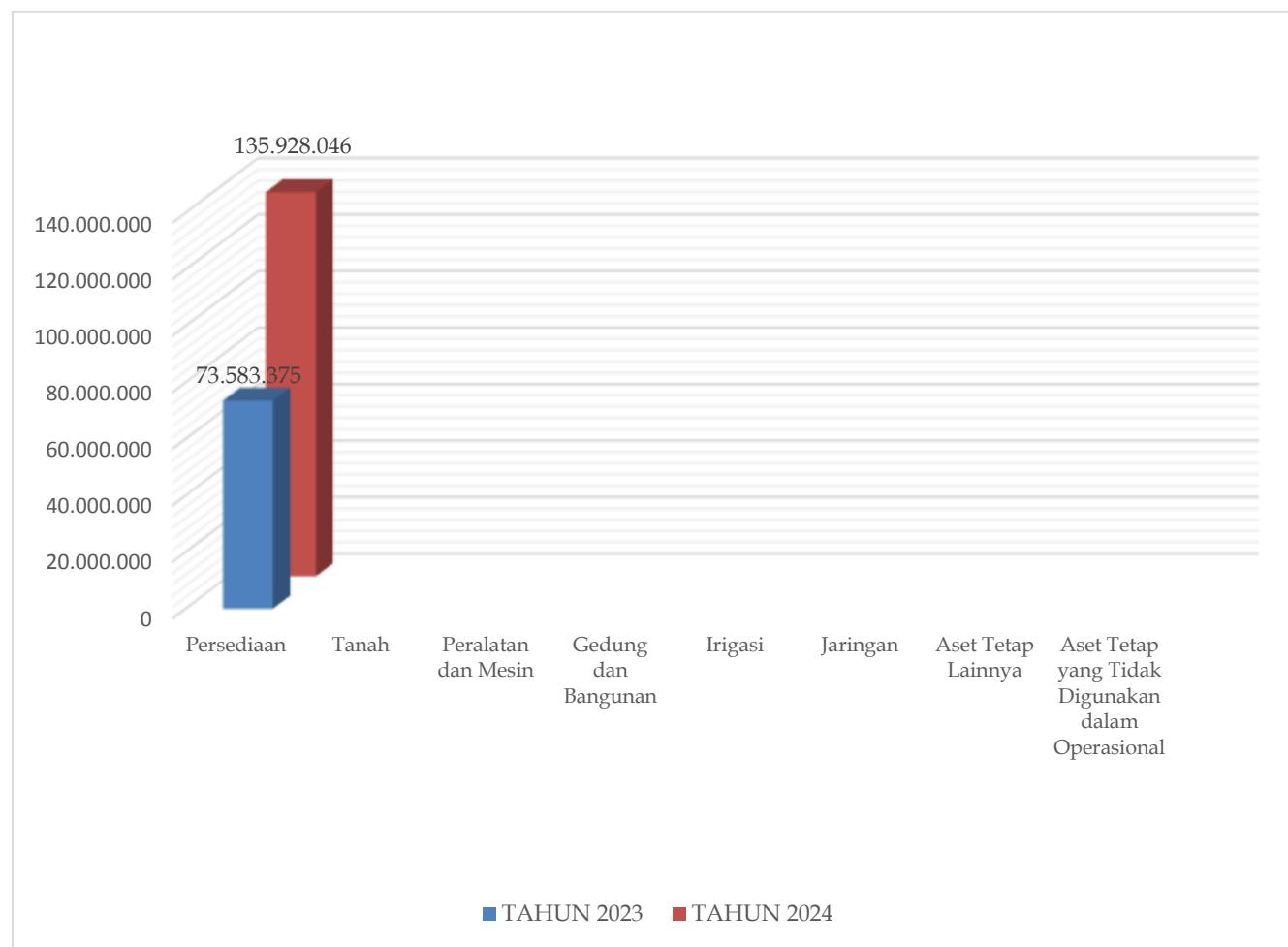
**TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)**

KODE AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2024
117111	Barang Konsumsi	73.583.375	135.928.046
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
131111	Tanah	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	0	0
134112	Irigasi	0	0
134113	Jaringan	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0
137111	Akumulasi Penyusutan Mesin	0	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0

137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
169122	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
Total		73.583.375	135.928.046

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2024

	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Irigasi	Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap yg tdk Digunakan
TA 2023	73.583.375	0	0	0	0	0	0	0
TA 2024	135.928.046	0	0	0	0	0	0	0



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- d. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Tahun 2023, yang dijelaskan pada tabel berikut.

**TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024**

PERSEDIAAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Barang Konsumsi	73.583.375	135.928.046
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau	0	0

diserahkan kepada masyarakat		
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nilai Konstruksi dalam Pengerajan pada Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan Tahun 2023.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024.

**TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2024**

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Barang Konsumsi	73.583.375	135.928.046
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Irigasi	0	0
Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0

Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	0
Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
Total	73.583.375	135.928.046

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak terdapat kendala yang berarti dalam penata usahaan aset pada DIPA 03 satuan kerja Pengadilan Negeri Pontianak.

5.2. SARAN

Agar kedepannya Pengadilan Negeri Pontianak dapat menjadi prioritas dalam pembangunan gedung dan pengadaan aset sebagai sarana pendukung dalam Pelayanan masyarakat pencari keadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2025 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 099239 **PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Tql Data : 27/02/25 12:25 PM

Tgl Cetak : 27/02/25 5:31 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

114

卷之三

engadian Negeri Pontianak

R NELLY, S.T., M.M.

***LAMPIRAN III
LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL***

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 03/03/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 27/02/25 5:31 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T., M.M.

197706242006042001

LAMPIRAN IV

***LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD***

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 27/02/25 12:25 PM
Tanggal : 27/02/25 5:31 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pontianak, 25 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY S.T., M.M.
197706242006042001

LAMPIRAN V

**LAPORAN PERSEDIAAN
DAN BERITA ACARA
OPNAME FISIK**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Jalan Sultan Abdurrahman No 89, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116. www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

**Berita Acara Opname Fisik (*Stock Opname*) Persediaan
Pengadilan Negeri Pontianak
No: 02/099239/SO/01/2025**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **14** bulan **Januari** tahun **2025** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : LILY WIDYANTI, SE
NIP. : 197707282006042001
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Nama : LISA ENDAH FATAYANI, A.Md.
NIP. : 197706262022032019
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara

3. Nama : RUSLI
NIP. : -
Jabatan : PPNPN

Menyatakan bahwa telah melakukan **Stock Opname** barang persediaan 099239 Semester 2 Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Opname Fisik (*Stock Opname*). Adapun total Nilai Barang per 31 Desember 2024 meliputi ;

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Barang Konsumsi | : Rp135.928.046,- |
| b. Bahan Untuk Pemeliharaan | : Rp 0,- |
| Total | : Rp135.928.046,- |

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1. LILY WIDYANTI, SE NIP.197707282006042001
2. LISA ENDAH FATAYANI, A.Md. NIP. 199706262022032019
3. RUSLI NIP. -



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang

Yuniar Nelly

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-E1 : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,456,200
000023	Pensil 2B	235,700
000066	Spidol White Board	187,500
000067	Spidol Marker Permanent	22,000
000085	spidol kecil	0
000144	Pulpen Kenko K1	80,000
000147	Pulpen Joyko Spirit	931,000
000148	Pulpen Tizo	0
000152	Pulpen Pilot	0
000157	Kertas Hvs warna	0
000159	Balliner	0
000160	Spidol Snowman OPM	0
000161	Pulpen Kenko Easy Gel	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	127,500
000003	Tinta stempel	14,000
000062	Bantalan Stempel	0
000064	Stick Note	103,500
000065	Bantalan Stempel 1	10,000
1010301003	Penjepit Kertas	606,000
000104	binder clips No. 200	0
000131	binder clip 260	0
000132	paper clip no. 3	0
000133	Paper Clip No. 5	0
000134	Binder Clip No. 111	456,000
000137	Binder Clip 105	0
000138	Binder Clip 107	0
000140	Binder Clip 280	0
000141	Clip Bulldog	150,000
000142	Pelubang Kertas	0
1010301004	Penghapus/Korektor	45,000
000138	Penghapus pensil	0
000141	tipe eks kertas	45,000
1010301005	Buku Tulis	612,000
000012	Buku ekspedisi	216,000
000013	Buku Folio 100 lbr	0
000083	buku folio isi 200	0
000084	Buku Double Folio	396,000
000085	Buku Kwitansi	0
000086	Buku Bloknote	0
000087	Buku Folio Isi 50	0
1010301006	Ordner Dan Map	1,762,000

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000047	Map Kertas Biasa	100,000
000049	Ordner Besar	177,000
000050	Map Plastik Jepit	0
000140	File Box	0
000144	Zipper Bag	0
000146	Map Biola	0
000147	map file plastik	87,000
000150	map forte	0
000151	sheet protector 100 lbr	1,380,000
000153	clear sheet protector	18,000
1010301007	Penggaris	0
000086	penggaris besi 30 cm	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	539,000
000064	Cutter	539,000
1010301010	Alat Perekat	486,000
000026	Lakban Hitam 2	0
000079	isolasi bening	0
000147	Lem Stick	0
000148	Lakban Bening 1	0
000150	Double Tape 2	0
000152	Lakban Bening 2	456,000
000153	Double Tape 3M	0
000158	Double Tape Foam 25 mm	0
000161	Lakban Kuning 2	0
000163	Solasi Kertas	30,000
000165	Isolasi Band	0
1010301012	Staples	0
000002	Staples No. 10	0
000003	Staples No. 3	0
000006	Saples Guntaker	0
1010301013	Isi Staples	0
000005	Isi Staples No. 10	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	190,000
000006	Pelubang Kertas	140,000
000116	gunting Besar	0
000117	Gunting Sedang	27,000
000120	Lembar Disposisi	23,000
000121	Keranjang Surat	0
000122	Isi Pulpen	0
000123	stryofoam	0
000124	mika meja	0
000126	Pembatas buku	0
000127	materai 10.000	0
000129	Kwitansi	0
000130	Push Pin	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000131	Pelubang Kertas	0
1010302001	Kertas HVS	6,818,500
000002	HVS Warna	577,500
000005	HVS A4 80gsm	6,241,000
000006	HVS F4 80gsm	0
000010	Kertas HVS F4 75 Gr	0
000011	Kertas HVS A4 75 Gr	0
1010302002	Berbagai Kertas	1,454,200
000041	Karbon	650,000
000057	Kertas Kissing	0
000103	kertas stiker	70,000
000136	kertas stiker undangan	0
000137	Label CD	0
000141	Memo Pembatas (Memo Stiker)	0
000145	kertas buffalo	184,200
000150	Kertas Foto	130,000
000151	Kertas Jasmin	0
000152	Kertas Samson	0
000153	Kertas Concord	0
000154	Ketas Pindo	180,000
000155	Kertas Termal	240,000
000156	Tissue Wajah	0
000157	Tissue Napkin	0
1010302004	Amplop	1,736,000
000010	Amplop Coklat Uk. Kabinet	700,000
000011	Amplop Putih Royal	0
000078	Amplop cassing uk. map	600,000
000080	Amplop Uk. Folio	270,000
000081	Amplop No. 90	166,000
000082	Amplop Cassing per Pcs	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	32,000
000002	Kertas Foto	0
000003	Kertas Thermal	0
000004	Kertas Buffalo	0
000005	Kertas BC Pindo	0
000006	Kertas Samson	32,000
1010303001	Transparant Sheet	240,000
000001	Plastik File Uk. HVS	240,000
1010304002	Computer File/Tempat Disket	56,000
000135	CD Case	56,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	6,760,000
000032	Tinta Canon Black	0
000085	Cartridge Canon 810	0
000086	Cartridge Canon 811	0
000087	Cartridge Canon 740	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000089	Tinta Epson Ori	0
000091	Catridge Canon 745	2,520,000
000092	Catridge Canon 746	2,460,000
000093	Tinta Epson 664	210,000
000094	Tinta Botol Pixma 790	0
000095	Tinta Suntik Hitam	0
000096	Tinta Botol Epson Seri L	300,000
000097	Tinta Epson 003	0
000101	Catridge HP 803 black	0
000102	Catridge Canon BH-7	0
000103	Tinta HP GT-53 Hitam Botol	135,000
000104	Tinta Canon 71-PGBK	925,000
000105	Catridge HP X4E75AA	210,000
1010304006	USB/Flash Disk	1,835,000
000127	Flash Disc 16 GB	855,000
000128	Flash Disc 32 GB	980,000
000129	Flash Dish 64 GB	0
000130	USB 2.0	0
1010304008	CD/DVD Drive	250,000
000001	CD-R	250,000
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Hardisk Internal	0
1010304010	Mouse	400,000
000001	Mouse	400,000
000002	Mouse M.170	0
000003	Alas Mouse	0
1010304011	CD/DVD	0
000001	cd link	0
000002	DVD Blank	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	0
000001	Keyboard Jenius	0
000002	Alas Mouse	0
000003	Keyboard dekstop	0
000004	Catridge 811 Warna	0
000005	Catridge 810 Hitam	0
1010306001	Kabel Listrik	0
000120	Kabel	0
000123	Kabel Hansonic	0
1010306002	Lampu Listrik	555,000
000100	lampu pilips 8w	0
000104	Lampu LTD 12 watt	290,000
000105	Lampu LED Philips 35 Watt	0
000106	Lampu LED Philips 12 Watt	0
000107	lampu LED Philips 2018	0
000108	LAMPU 20 WT	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000110	Lampu 40 Wat	0
000111	Lampu Pilip(3+1)	0
000112	Lampu 75 W F	0
000113	Lampu Starlux	0
000114	Lampu Philip LED 14 W	0
000115	Lampu Down Light 18W	100,000
000116	Lampu Bulat 18 W	165,000
000117	Lampu 12 W	0
000118	Lampu Philips 10W	0
000119	Lampu 30 W	0
000120	LED 32W	0
000121	LED IN LITE	0
1010306003	Stop Kontak	0
000001	Stop Kontak 4 Lub.	0
000005	Colokan	0
1010306005	Stacker	0
000029	Stacker	0
1010306010	Batu Baterai	122,500
000021	Baterai AA	122,500
000022	Baterai AAA	0
000053	Baterai 9V	0
000093	carger baterai	0
000094	baterai cas	0
1010306999	Alat Listrik Lainnya	0
000146	Terminal Listrik	0
1010309001	Meterai	0
000001	Materai 10.000	0
1010309003	Stempel	680,000
000001	Stempel	190,000
000002	Stempel Laser	150,000
000003	stempel laser kantor	340,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,935,000
000001	Kalkulator	350,000
000002	Tissue Napkin (Kode Salah)	0
000003	Tissue Wajah (Kode Salah)	0
000004	Id Card/Lanyard	2,585,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	430,000
000001	Push Pin	0
000002	Jam Dinding	265,000
000003	Benang Kasur	0
000008	Kit Black Magic	165,000
000009	Bell Alarm	0
000019	Kalkulator	0
000020	Kit Shampo Mobil	0
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000001	Baygon Sempot	0
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	402,000
000001	Materai 6000	0
000002	Kaki Dispenser	0
000003	Tutup Galon Air 40 X	0
000009	Butterfly Tusukan Bon	162,000
000011	Name Tag	0
000012	Plastik Meteran Tebal	0
000013	Derk Set/Kabinet Kecil untuk Meja	240,000
Jumlah per Akun		30,529,900
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	1,924,000
000055	Sapu Ijuk	348,000
000056	Sekop Sampah	387,000
000105	sapu lidi	980,000
000112	sikat gagang (WC)	209,000
000146	Sikat Closet	0
000148	sapu rotan	0
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	3,368,500
000039	Serbet tangan	418,000
000040	Lap Pel	1,730,000
000065	Pel Sumbu	828,000
000137	Lap Kanebo	312,000
000141	Pel Nagoya B	0
000142	Pel Nagoya T	0
000144	Pembersih lantai	0
000145	Vixal	0
000146	Wipol Botol	0
000147	Refil Wipol	0
000148	Pembersih Kaca Spray	0
000149	Refil Pembersih Kaca	0
000150	Kemoceng	80,500
000151	Sponge Cuci Piring	0
000152	Serbet Tangan Lusin	0
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	1,341,000
000051	Gayung	396,000
000054	Ember	945,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	2,587,000
000058	Tempat sampah	580,000
000143	Keset Perca	0
000144	Plastik Sampah Uk.60x100	1,832,000
000145	Plastik Sampah Uk. 90x120	0
000151	kantong plastik belanja	175,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	15,317,700
000017	WIPOL	522,500

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000037	Pembersih Lantai	702,000
000038	Vixal	910,000
000042	Sabun cuci tangan	0
000089	Pembersih kaca	825,000
000111	pembersih lantai (axi)	110,000
000123	Kapur Barus Ball Jumbo	1,645,000
000127	Sabun Cuci Tangan Lifeboy	0
000135	kapur barus	0
000136	Braso	0
000137	Pembersih Furniture	0
000140	Sabun Tangan 3,7 Liter	5,390,000
000142	Refil Pembersih Kaca	304,200
000145	Baygon Semprot	1,785,000
000146	Refil Wipol	114,000
000147	Pembersih Lantai 4Lt	0
000148	Sabun Cuci Tangan 5L	0
000149	Kapur Barus Gantung	825,000
000150	Kapur Barus Kecil	2,185,000
1010305012	Pengharum Ruangan	5,039,000
000016	Pengharum Gantung	36,000
000080	Pengharum semprot	625,000
000106	refil pengharum matic	0
000124	Refil Pengharum Matic	698,000
000134	Pengharum Mobil	0
000135	Pengharum Automatic	0
000136	Dahlia Refill S.Q. Gantung	0
000137	Glad Denamon	0
000139	Mesin Pengharum Matic	3,680,000
000140	Refill Pengharum Ruangan Ace	0
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	0
000016	Tissue Wajah (Kode Salah)	0
000102	Tissue Napkin (Kode Salah)	0
000146	Disenser Sabun	0
000148	Tempat Tissue (Kode Salah)	0
000150	Taplak Meja	0
000151	Tissu interfol (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		29,577,200
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai 10.000 (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	0
000001	Refil Pembersih Kaca (Kode Salah)	0
000002	Kapur Barus Kecil (Kode Salah)	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2024
TAHUN ANGGARAN : 2024

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 005.01.1300.099066

KODE	URAIAN	NILAI PER 31-12-2024
000003	Sabun Cuci Tangan 3,7l (Kode Salah)	0
000004	Tissue (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0
117131	Bahan Baku	
1010105999	Bahan Baku Lainnya	0
000002	Id Card	0
Jumlah per Akun		0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
1011001007	Barang Persediaan	0
000001	Kapur Barus Ball Jumbo (Salah Kode)	0
000006	Pembersih Kaca Spray (Kode Salah)	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		60,107,100

Keterangan

1. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
 2. Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang



Disetujui tanggal : 31-12-2024

Kuasa Pengguna Barang

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

YUNIAR NELLY, S.T., M.M.

197706242006042001

Pontianak, 31-12-2024
 Petugas Pengelola Persediaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lisa Endah Fatayani'.

LISA ENDAH FATAYANI, A.Md.
 199706262022032019

LAMPIRAN VI

***LAPORAN POSISI BMN DAN
KEUANGAN PADA NERACA***

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSI SI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 099239 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Tgl.Data : 27/02/25 12:25 PM

Tgl.Cetak : 27/02/25 5:50 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmnn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	135,928,046
J U M L A H		135,928,046

Pontianak, 25 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak

YUNIAR, NELLY, S.T., M.M.
197706242006042001



LAMPIRAN VII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
BAGIAN ANGGARAN 005.03 BADAN PERADILAN UMUM
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

NOMOR : BA/06/099239/XII/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Widyanti, S.E.
NIP : 19770728 200604 2 001
Jabatan : Operator Modul GLP

Nama : Lisa Endah Fatayani, A.Md.
NIP : 19970626 202203 2 019
Jabatan : Operator Modul Aset dan Persediaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Pontianak.

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Pontianak dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca Belanja Modal	Nilai BMN Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024			
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	73.583.375	224.867.728	(162.523.057)	135.928.046
1	Persediaan	73.583.375	224.867.728	(162.523.057)	135.928.046
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegeriptk@gmail.com

C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Diganakan	0	0	0	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	73.583.375	224.867.728	(162.523.057)	135.928.046

Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator GLP

Lily Widiyanti, S.E.
NIP. 19770728 200604 2 001

Operator Aset dan Persediaan

Lisa Endah Fatayani, A.Md.
NIP. 19970626 202203 2 019

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Barang



Yuniar Nelly, S.T., M.M.

NIP. 19770624 200604 2 001

LAMPIRAN VIII

LAPORAN KONDISI BARANG

**LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK SEMUA KONDISI
PER DESEMBER 2024 AUDITED**

MAHKAMAH AGUNG

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 005.03.1300.099239

Tanggal : 27/02/2025 17.32.19
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Jumlah null</i>								

Pontianak, 31 Desember 2024

Penanggung Jawab UAKPB

Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak



YUNIAR NELLY, S.T, M.M.
197706242006042001